Jurnal Archipelago
Jurnal Tata Kelola Pemerintahan

© **Fitraturrahmi**
Jurnal Archipelago,
Vol 4 (2), p.131-142, Juni 2026

AKSES TERBUKA **ARTIKEL**

Diterima
12 November 2025

Disetujui
17 April 2026

Diterbitkan
Juni 2026

DOI

Indonesia Moeslim Travel Index (IMTI) sebagai Pendorong Inovasi dan Transformasi Digital di Provinsi Kepri Melalui Penguatan Sinergi Lintas Sektor.

The Indonesian Moeslim Travel Index (IMTI) as a Driver of Innovation and Digital Transformation in Riau Islands Province by Strengthening Cross Sector Synergy.

Fitraturrahmi

Dinas Pariwisata Provinsi Kepulaua Riau

mimiosman76@gmail.com

081372143222

Abstrak: Kepulauan Riau (Kepri) menempati posisi ke-12 dari 15 wilayah di Indonesia dalam "Program Indonesia *Moeslim Travel Index"*. Dengan posisi yang strategis menjadikan Kepri sebagai salah satu gerbang utama bagi Indonesia bagian barat. Kepri berbatasan langsung dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia dan Singapura yang serius dalam menjamin keamanan, kenyamanan dan kepercayaan wisatawan muslim dari seluruh dunia serta sangat kuat dalam pembangunan SDM dan infrastruktur. Selain Kepri, beberapa wilayah lain yang juga menjadi prioritas pengembangan konsep ini adalah Aceh, Riau, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Jakarta, Yogyakarta, Nusa tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bengkulu dan Gorontalo. Sebuah Roadmap terkait *Halal Tourism Industry* tengah disusun oleh Tim KNEKS dan BRIN, akan menjadi basis strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah termasuk potensi pengembangan regulasi ekonomi syariah serta pariwisata halal Indonesia di masa mendatang.

Kata Kunci: Ekosistem Pariwisata Halal; Kearifan Lokal; Sinergi Lintas Sektor.

© **Fitraturrahmi**
Jurnal Archipelago,
Vol 4 (2), p.131-142, Juni 2026

Abstrack : *The Riau Islands (Kepri) is in 12th place out of 15 regions in Indonesia targeted by the Indonesia Moeslim Travel Index Program. It's strategic location makes Kepri one of the main gateways to western Indonesia. Kepri shares borders with other Southeast Asean Countries such as Malaysia and Singapore, which are commited to ensuring the safety, comfort, and trust of muslim tourists from around the world and are also highly active in human resources and infrastructure development. In addition to Kepri, several other regions prioritized for this concept are Aceh, Riau, West Sumatera, West Java, East Java, Central Java, Banten, Jakarta, Yogyakarta, West Nusa Tenggara, South Kalimantan, South Sulawesi, Bengkulu, and Gorontalo. A roadmap related to Halal Tourism Industry is being drafted by the KNEKS and BRIN teams, which will serve as a startegic basis in supporting government policies, including the potential development of sharia economics regulations and Indonesia's Halal Tourism in the future.*

Keywords: Halal Tourism Ecosystem; Local Wisdom; Cross Sector Synergy.

© 2026 The Author (s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-SahreAlike 4.0 International License

© Fitraturrahmi
Jurnal Archipelago,
Vol 4 (2), p.131-142, Juni 2026

I. PENDAHULUAN

Pariwisata adalah salah satu pilar penting dalam perekonomian global karena menjadi salah satu penghasil devisa negara terbesar. Penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman adalah sektor yang memberikan kontribusi, yang berasal dari jumlah kunjungan wisatawan, okupansi hotel, dan perhitungan rata-rata pengeluaran wisatawan (Gössling et al., 2020; Ikhwan, 2022).

Dampak jangka panjang atas pengelolaan kepariwisataan wajib dipertimbangkan terutama dari aktivitas yang ditimbulkan dan berpengaruh terhadap lingkungan, masyarakat, ekonomi, kelestarian alam dan budaya lokal, hal inilah yang disebut sebagai keberkelanjutan atau sustainable tourism (Ikhwan et al., 2020).

Selanjutnya sektor ekonomi kreatif juga mendorong meningkatkan potensi pariwisata di suatu daerah. Dengan penciptaan produk dan layanan kreatif secara otomatis akan memperkaya kesan pengalaman para wisatawan, dan akan membuat mereka menjadi lebih tertarik dan ingin kembali berkunjung.

Sebuah tren menarik dalam perkembangan pariwisata halal global yang kami dapatkan dari laporan tahunan Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2025. Tercatat jumlah wisatawan muslim internasional mengalami lonjakan cukup tinggi yaitu sebesar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 176 juta orang pada 2024. Dalam menyikapi fenomena tersebut para pelaku industri pariwisata wajib beradaptasi agar tetap serasi dan mampu bersaing dengan menciptakan destinasi wisata yang memberikan pengalaman inklusif, aman, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

Asia Tenggara menjadi kawasan utama dari sektor pariwisata ramah muslim. Malaysia sebagai destinasi nomor satu di antara negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), didukung infrastruktur halal yang kuat dan beragam.

Destinasi paling ramah muslim dari kategori negara non-OKI adalah Singapura. Negara kecil ini sangat serius dalam menjamin kenyamanan dan kepercayaan wisatawan muslim secara menyeluruh. Thailand dan Filipina juga mencatatkan peningkatan, melalui perluasan layanan bersertifikat halal dan pengembangan akses fasilitas ibadah di tempat-tempat wisata populer.

Dengan kekayaan budaya serta dukungan pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata syariah membawa Indonesia berada di posisi atas. Jumlah muslim yang besar, menjadi Barometer Pariwisata Moeslim Frindly sekaligus ditargetkan sebagai Hub di dunia. Menurut Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata RI perlu diupayakan peningkatan kualitas dan pariwisata ramah muslim. Faktor- faktor yang perlu diperhatikan dalam peningkatan daya saing ekosistem pariwisata halal adalah *access, communication, environment, dan services*.



Gambar 1.
Contoh Paket Wisata
Ramah Muslim Aceh, Medan, Jakarta, dan Lombok

Sumber: Indonesia Inbound Tour Operator Associations (2026).

Tantangan utama dalam penerapan pariwisata halal adalah masih terbatasnya penyediaan

© Fitraturrahmi
Jurnal Archipelago,
Vol 4 (2), p.131-142, Juni 2026

infrastruktur ramah muslim seperti tempat sholat atau musholla di area umum dan restoran bersertifikat halal. Selain itu belum meratanya edukasi sehingga kesadaran dan pemahaman di kalangan pelaku industri serta masih kurangnya standar dan sertifikasi halal yang konsisten. Selain itu ketersediaan SDM yang kompeten juga masih terbatas, terutama penguasaan bahasa asing dan hospitality, Promosi yang kurang efektif, dan adanya persepsi negatif atau stereotip juga masih sering kita temui.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

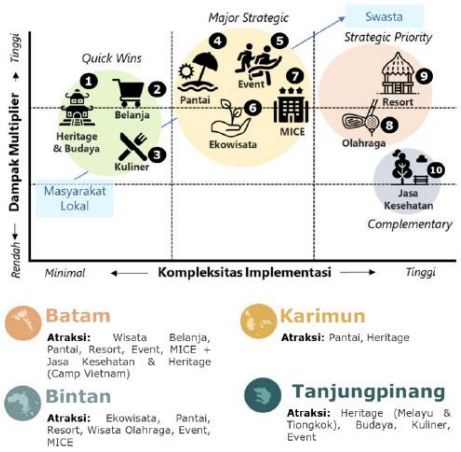
Tulisan ini termasuk dalam kategori penelitian Analisis deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan situasi serta kondisi pelaksanaan daerah wisata berbasis masyarakat berdasarkan kebijakan yang ada, dengan memperhatikan potensi dan hambatan dalam implementasinya. Fokus penulisan jurnal ini juga akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) , sehingga dapat diterapkan dan dipadukan dengan konsep pengelolaan desa wisata, podarwis, Daya Tarik Wisata & Toilet. desa wisata berbasis masyarakat untuk menciptakan Desa Wisata maupun Desa Kreatif yang berkelanjutan (Kementerian Sekretaris Negara RI, 2025b, 2025a; Republik Indonesia, 2017; Undang-undang, 2024).

B. Desain Penelitian

Deskriptif eksploratif menjadi desain penelitian kami, melalui penggalian, analisa, dan mendeskripsikan berbagai kebijakan terkait pariwisata serta memeriksa hubungan antara kebijakan tersebut dengan implementasi pengembangan industri pariwisata halal.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Provinsi Kepulauan Riau (terutama wilayah BBK), yang memiliki potensi besar dan startegis dalam pengembangan sektor pariwisata halal, dilihat dari sisi keindahan alam maupun kultur serta nilai sejarahnya. Sesuai amanah Perpres No. 1 Tahun 2024, bahwa kawasan BBK diharapkan akan menjadi pusat pengembangan industri yang high and valuable technology dengan penciptaan nilai tambah tinggi yang salah satunya adalah melalui pengembangan klaster Halal Food Industry di Bintan.



Gambar 2.
Klasterisasi Tema Pariwisata BBK

Sumber: Perpres Nomor 1 Tahun 2024

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder:

1. **Data Primer**
   a. Berbagai informasi melalui wawancara dan FGD baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, pelaku industri yaitu hotel, restoran, pemandu wisata, dll., masyarakat yang terlibat dalam industri pariwisata serta menggali pemahaman mereka tentang kebijakan dan potensi pengembangan pariwisata halal.
   b. Observasi di lapangan terhadap destinasi wisata, penyediaan fasilitasnya, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat,

© Fitraturrahmi
Jurnal Archipelago,
Vol 4 (2), p.131-142, Juni 2026

untuk menilai apakah praktik pariwisata di Kepri sudah siap mendukung konsep pariwisata halal dengan fokus keberlanjutan.

2. **Data Sekunder:**
   a. Dokumen yang berhubungan dengan kebijakan kepariwisataan serta dokumen kebijakan yang relate dengan pengembangan kepariwisataan di Provinsi Kepri.
   b. Data statistik yang berkaitan dengan jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik, potensi destinasi wisata, serta indikator ekonomi terkait lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam rangka mendapatkan informasi yang komprehensif terkait potensi pariwisata halal di Kepri, antara lain:

1. Menggali perspektif tentang kebijakan yang ada serta potensi pengembangan pariwisata halal di Kepri dilakukan dialog dan diskusi dengan para pemangku kebijakan, pelaku industri pariwisata, asosiasi dan masyarakat lokal sehingga mampu mengidentifikasi tantangan serta memaksimalkan potensi dalam pengembangan pariwisata halal.
2. Observasi lapangan terhadap kondisi objek wisata, fasilitas pariwisata, dan interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal. Peneliti juga melakukan evaluasi untuk menilai apakah destinasi wisata dan infrastruktur saat ini sudah mendukung dan memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan sesuai dengan konsep pariwisata halal.
3. Studi Dokumentasi melalui pengumpulan data yang berasal dari dokumen kebijakan yang relevan, serta data statistik pariwisata yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait kebijakan, potensi dan tantangan pariwisata halal, serta dampaknya terhadap perekonomian daerah dilakukan beberapa langkah analisis data tematik yaitu:

1. Reduksi Data yaitu identifikasi data yang relevan hasil wawancara, FGD, dan observasi sesuai dengan fokus penelitian.
2. Koding Data**:** Organisasi data ke dalam kategori tematik terkait kebijakan, tantangan, dan potensi pariwisata halal.
3. Penyajian Data**:** Data dalam bentuk narasi yang menggambarkan hasil penelitian tentang kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut mendukung pengembangan pariwisata halal di Kepri.
4. Penarikan Kesimpulan**:** Berdasarkan temuan, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi pariwisata halal dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan yang dapat mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS):

1. Penguatan Penerapan Pariwisata Berkelanjutan

a. Pembangunan destinasi pariwisata berkualitas sesuai preferensi pasar yang berkembang kearah pariwisata berkelanjutan dan pariwisata regeneratif. Provinsi Kepri menjadi salah satu dari tiga Provinsi yaitu Jakarta dan Bali yang ditetapkan sebagai daerah prioritas penerapan konsep pariwisata regeneratif. Hal ini tentunya menjadi peluang besar bagi Kepri dalam pengembangan sektor pariwisatanya.

© **Fitraturrahmi**
Jurnal Archipelago,
Vol 4 (2), p.131-142, Juni 2026

b. Akselerasi rantai pasok pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, misalnya Pihak Hotel membeli hasil laut dari nelayan lokal dan memastikan praktik penangkapan ikan tidak merusak ekosistem laut. Contoh lainnya souvenir dari UMKM kerajinan lokal berbahan ramah lingkungan sekaligus melestarikan budaya melayu dan Islam.

c. Penataan tata kelola destinasi dan industri pariwisata yang terstandardisasi, melalui penerapan sistem manajemen dan regulasi yang jelas, konsisten serta terstandarisasi nasional maupun internasional, baik dari fasilitas utama maupun pendukungnya.

d. Pembangunan infrastruktur hijau untuk infrastruktur dasar dan pendukung pariwisata. Contohnya Sistem air bersih dengan teknologi hemat air, pengelolaan sampah terpadu di destinasi wisata, energi terbarukan untuk penerangan jalan.

e. Perluasan penerapan Blue Economy (berbasis laut dan pesisir), Green Economy (ramah lingkungan) & Circular Economy

f. Peningkatan keterampilan SDM pariwisata melalui pelatihan-pelatihan dan sertifikasi.

2. Peningkatan Daya Saing Pariwisata

a. Penguatan *branding* Wonderful Kepri dengan arah penguatan yang konsisten dengan mengedepankan identitas yang jelas, promosi secara digital, serta nilai keberlanjutan.

b. Perluasan kebijakan relaksasi visa untuk perjalanan bisnis, SAVE *tourism*, dan kebutuhan khusus wisatawan lainnya, termasuk penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Peningkatan integrasi dan kualitas multi moda untuk mobilitas yang efisien dan moderen serta layanan berbasis teknologi digital (*smart services),* sehingga tercipta pengalaman wisata yang mudah, cepat, personal dan efisien, aman dan nyaman.

c. Peningkatan kompetensi SDM pariwisata tersertifikasi sangat penting karena merupakan fondasi daya saing industri pariwisata. Sertifikasi bukan sekedar formalitas akan tetapi merupakan jaminan kualitas layanan yang diakui baik secara nasional maupun internasional.

d. Peningkatan kualitas atraksi minat khusus, MICE, dan *event* standar internasional

e. Peluncuran Program "JIWA" merupakan hasil kolaborasi antara Konsulat Jenderal RI (KJRI) Johor Bahru, Pemprov Kepri, serta Pelaku Industri Pariwisata di Kepri. Manfaat Program JIWA adalah Wisman asal Johor bisa mendapatkan diskon di berbagai hotel, restoran, transportasi dan layanan wisata lainnya di Kepri hanya dengan menunjukkan *ID Card* nya.

B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau (RPJPD).

Arah kebijakan pariwisata dalam rancangan RPJPN 2026-2045 yaitu dengan mewujudkan pariwisata Indonesia sebagai destinasi unggulan dunia yang berkelanjutan dan bernilai tambah yang tinggi melalui strategi berikut:

© Fitraturrahmi
Jurnal Archipelago,
Vol 4 (2), p.131-142, Juni 2026

1. Integrasi konektivitas domestik dan global didukung kebijakan visa yang kondusif, integrasi konektivitas global menghubungkan Kepri dengan negara tetangga (Singapura, Malaysia dan Thailand) melalui jalur udara dan laut akan membuat Kepri sebagai destinasi lintas batas *(crossborder tourism)*.
2. Peningkatan inovasi dan pemanfaatan sumberdaya baik alam, budaya, kreativitas, dan olahraga sehingga menjadi magnet dan memperkaya daya tarik destinasi pariwisata yang disesuaikan dengan preferensi wisatawan;
3. Peningkatan SDM dan UMKM pariwisata berdaya saing global agar Kepri tidak hanya menjadi destinasi regional tapi juga mampu bersaing di panggung internasional melalui layanan yang profesional, produk yang berkualitas, serta citra destinasi yang kuat.
4. Penguatan rantai pasok industry pariwisata yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan penerapan *blue, green, and circular economy*, digitalisasi, dan kemajuan teknologi.

Tiga klaster utama Kepri dari arah kebijakan pembangunan untuk transformasi ekonomi, yaitu:

1. Klaster wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas;
2. Klaster wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang; dan
3. Klaster wilayah Lingga.

C. Kepri dan kesiapan Penerapan Pariwisata halal

Pengembangan wilayah BBK-TPI berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Tanjungpinang dan Karimun adalah sebagai berikut:

1. Kota Batam sebagai hub logistik internasional, industri kedirgantaraan, industri ringan bernilai strategis, industri digital dan kreatif, pusat perdagangan internasional dan keuangan, dan pariwisata kesehatan yang terintegrasi.
2. Kabupaten Bintan diarahkan menjadi pusat kegiatan pariwisata internasional, *Maintenance, Repair, and Overhaul industry* (MRO), industri alumina, industri pengolahan makanan, industri kedirgantaraan, dan industri olahraga.
3. Kota Tanjungpinang diarahkan sebagai pusat wisata warisan budaya Melayu-Tiongkok, industri halal, industri perikanan, serta pusat bisnis.
4. Kabupaten Karimun diproyeksikan sebagai pusat industri maritim, industri penampungan minyak, industri teknologi pertanian, industri pengolahan hasil laut, dan pariwisata bahari.

Pengembangan pariwisata pada empat wilayah ini diarahkan sesuai klasterisasi tema pariwisata yang telah ditentukan berdasarkan dampak pengganda dan kompleksitas pengembangan destinasi. Kawasan Batam dan Bintan ditetapkan sebagai pusat kegiatan pariwisata berskala internasional didukung oleh Tanjungpinang dan Karimun.

Berdasarkan Data BPS Provinsi Kepulauan Riau, pertumbuhan ekonomi Kepri pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 7,14% berasal dari kombinasi sektor industri yang kuat, pemulihan pariwisata, dan ledakan investasi.

Beberapa aspek lainnya dari pertumbuhan ekonomi yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Gini Ratio yang artinya pemerataan pembangunan, indikator ini penting dalam menilai tingkat kesenjangan distribusi

© **Fitraturrahmi**
Jurnal Archipelago,
Vol 4 (2), p.131-142, Juni 2026

pendapatan dalam suatu masyarakat. Semakin tinggi Gini Ratio, maka semakin besar ketimpangan pendapatan yang terjadi. Gini Ratio nasional pada Maret 2025 sebesar 0,375 dan Provinsi Kepulauan Riau berada di atas level nasional yaitu 0,382.

2. IPM Kepri menduduki peringkat ke 4 secara nasional selama 15 tahun terakhir. Sementara itu, jika dibandingkan se-Sumatera IPM Kepulauan Riau peringkat 1
3. Pertumbuhan ekonomi tanpa migas selalu lebih tinggi dibandingkan dengan migas. Namun, pada Triwulan II- 2025, pola ini berbalik, di mana pertumbuhan dengan migas justru lebih tinggi. Khususnya untuk Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas yang memiliki PDRB dari migas paling tinggi.

4. Potensi PDRB Lapangan Usaha Potensi yang dimiliki oleh kabupaten kota, dapat ditiitikberatkan pada :
   a. Percepatan Realisasi Proyek Infrastruktur Pemerintah melalui optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal serta menitikberatkan kepada proyek yang memberikan efek berganda (infrastruktur yang mendukung perekonomian seperti jalan/ jembatan, pasar, dll)

   b. Meningkatkan produktivitas sektor primer melalui kebijakan daerah untuk meningkatkan produktivitas sektor primer sesuai potensi lokal; alokasi APBD untuk cold storage, bantuan saprodi, benih, irigasi, dll; kemitraan antara petani/ nelayan/ peternak dan industri untuk penyerapan hasil panen. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelenggarakan Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi seluruh DKP se-Indonesia dan pelaku bisnis dari industri olahan hasil laut. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa Indonesia punya potensi besar untuk meningkatkan export hasil laut bersertifikasi halal ke 54 negara anggota OKI.

   c. Meningkatkan output industri manufaktur sesuai potensi lokal, seperti hilirisasi dan industrialisasi produk unggulan daerah; percepatan izin ekspor produk hasil hilirisasi; bagi daerah yang memiliki potensi pariwisata perlu dilakukan: penggalian potensi pariwisata di masing-masing daerah, memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk promosi pariwisata lewat event-event menarik seperti Penyengat Heritage, Wonderful Kepri Kogabwilhan I Fun Fishing, wonderfood Kepri Fest dll. Meningkatkan layanan pariwisata melalui pelatihan kepada pelaku industri pariwisata; Fasilitasi sertifikasi HKI, Halal, SNI, dan TKDN untuk UMKM industri lokal. Beberapa program tersebut tersebar di beberapa Dinas seperti Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi & UKM dan Dinas Perindustrian & Perdagangan.

Beberapa waktu yang lalu Menteri Pariwisata RI berkunjung ke Pulau Penyengat dan menyampaikan akan menjadikan Pulau Penyengat sebagai pusat wisata ramah muslim di kawasan Asia Tenggara.

Beberapa program unggulan Kementerian Pariwisata RI dalam rangka mendukung pariwisata Indonesia menuju destinasi kelas dunia:

1. Transformasi digital yaitu penerapan Tourism 5.0;

© Fitraturrahmi
Jurnal Archipelago,
Vol 4 (2), p.131-142, Juni 2026

2. Gerakan wisata bersih yang merupakan fokus dari keberlanjutan dan kebersihan;
3. Pariwisata naik kelas: *Gastro, Marine,* dan *Wellness Tourism*;
4. Event bertaraf global dengan IP Indonesia; serta.
5. Pengembangan desa wisata berbasis komunitas.



Gambar 3.
Kunjungan Menteri Pariwisata RI ke Pulau Penyengat

Sumber: IG Kepritourism (2025).

5. Fokus PDRB Pengeluaran:
   a. Mempercepat realisasi APBD melalui belanja pegawai, Belanja Barang & Jasa, Beanja Barang Modal, serta belanja Bantuan Sosial.
   b. Mempercepat realisasi investasi asing dan domestik melalui subsidi atau insentif pajak/ retribusi daerah terutama untuk investasi sektor prioritas.
   c. Pengendalian harga bahan pokok dengan pemantauan harga dan stok, menjaga pasokan, pasar murah, dll
   d. Memperluas kesempatan kerja melalui pengembangan kewirausahaan dan pemberian pelatihan kerja. Berbagai program dilaksanakan demi memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai perusahaan serta menciptakan wirausahawan yang baru dan siap bersaing. Melalui kerjasama Disnaker Kepri dengan perusahaan seperti PT. Bintan Resort Cakrawala (BRC) membuka Program Pemagangan Tenaga Kerja Dalam Negeri 2025 dengan penerapan metode pembelajaran campuran (blended learning).
6. Strategi lainnya adalah:
   a. Pencegahan ekspor impor ilegal melalui pengetatan pengawasan impor ilegal perlu disejalankan dengan solusi untuk menjamin ketersediaan komoditas tertentu.
   b. Permudah Perizinan Berusaha, hal ini perlu dilakukan agar muncul usaha-usaha baru dan mengurangi biaya yang timbul akibat proses pembukaan/ pendaftaran usaha baru.

IV. KESIMPULAN

Untuk menuju Konsep Pariwisata Halal yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah di Kepri sehingga mampu menempatkan Kepri sebagai "Halal Tourism Hub" yang benar-benar andal dan juga merata. Kita masih memiliki beberapa pekerjaan rumah besar yang perlu diselesaikan:

1. Disparitas jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melalui pintu masuk melalui Batam sebanyak 79,40% dari persentase total seluruh pintu masuk, disusul Bintan 13,47%, Karimun 4,47%, Tanjungpinang 2,65%.
2. Sarana prasarana utama dan pendukung di 6 kabupaten/ kota selain Batam yang belum terbangun secara optimal.
3. Pembangunan SDM untuk pembangunan yang bermartabat, sehingga tidak ada yang didahulukan atau merasa ditinggalkan,

selain itu juga diperlukan kepemimpinan transformasional dan peran pengikut yang baik dalam menghadapi berbagai tren dan perubahan yang demikian cepat di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Andrades, L., Martínez-Marín, E., & Romero-Dexeus, C. (2024). The Spanish Model for Smart Tourism Destination Management: A Methodological Approach. https://link.springer.com/10.1007/978-3-031-60709-7

Awan, U., & Sroufe, R. (2022). Sustainability in the Circular Economy: Insights and Dynamics of Designing Circular Business Models. Applied Sciences (Switzerland), 12(3). https://doi.org/10.3390/app12031521

BPJPH-KKP. (2025). BPJPH-KKP meningkatkan sertifikasi Produk Perikanan Halal.

Baloch, Q. B., Shah, S. N., Iqbal, N., Sheeraz, M., Asadullah, M., Mahar, S., & Khan, A. U. (2023). Impact of tourism development upon environmental sustainability: a suggested framework for sustainable ecotourism. Environmental Science and Pollution Research, 30(3), 5917–5930. https://doi.org/10.1007/s11356-022-22496-w

da Silva, M., Vaz, M. J., Miguel, I., & Ribeiro, B. (2024). The digital transition in tourism experiences in portugal: the perception of national tourists. XV International Tourism Congress, May, 83–90. https://doi.org/10.2478/9788367405287-010

Dias, Á., Viana, J., & Pereira, L. (2024). Barriers and policies affecting the implementation of sustainable tourism: the Portuguese experience. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 1–19. https://doi.org/10.1080/19407963.2024.2314514

dos Anjos, F. A., & Kennell, J. (2019). Tourism, governance and sustainable development. Sustainability (Switzerland), 11(16), 1–6. https://doi.org/10.3390/su11164257

Faridah Hj Hasssan., Siti Aisah Binti Yusop., Fatin Lina Amirah Binti Mohd Idris., Muhammad Izrin Hani bin Moh Rani., Santi Rahmawati (2023). Halal Tourism Industry Advantages and Challanges in Malaysia.

Fauzen, A., & Kumalasari, K. (2024). Governmentality within Collaborative Tourism Governance of the Nature Based Tourism. JESS (Journal of Education on Social Science), 08(02), 131–141.

Gandolfo, A., & Lupi, L. (2021). Circular economy, the transition of an incumbent focal firm: How to successfully reconcile environmental and economic sustainability? Business Strategy and the Environment, 30(7), 3297–3308. https://doi.org/10.1002/bse.2803

González-Rodríguez, M. R., Díaz-Fernández, M. C., & Pulido-Pavón, N. (2023). Tourist destination competitiveness: An international approach through the travel and tourism competitiveness index. Tourism Management Perspectives, 47(December 2022). https://doi.org/10.1016/j.tmp.2023.101127

Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 29(1), 1–20. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708

Ikhwan, Z. (2022). Collaborating the Role of Stakeholders in Waste Management. Jurnal Proteksi Kesehatan, 11(2), 70–78.

Ikhwan, Z., Harahap, R. H., Andayani, L., & Mulya, M. (2019). Partnership As An Effort

To Consolidate Waste Management Initiatives In Tourism Destinations On Small Islands: The Case Of Penyengat Island. ICESSD 2019, October 22-23, Jakarta, Indonesia, 1–10. https://doi.org/10.4108/eai.22-10-2019.2291486

Ikhwan, Z., Harahap, R. H., Andayani, L. S., & Mulya, M. B. (2020). The Economic Potential of Waste Management in Penyengat Island Tourism, Tanjungpinang City, Riau Island Province, Indonesia. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology, 18(4), 3043–3065.

Kementerian Sekretaris Negara RI. (2025a). PP Nomor 12 Tahun 2025.

Kementerian Sekretaris Negara RI. (2025b). PP Nomor 50 Tahun 2011 (pp. 1–6).

KementerianPariwisata. (2025). https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-menteri-pariwisata-targetkan-indonesia-terdepan-dalam-pariwisata-ramah-muslim

KNEKS. (2025). KNEKS dan BRIN Dorong Roadmap Riset Pariwisata Halal Jadi Strategi Nasional Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (kneks.go.id)

Krešić, D., & Gjurašić, M. (2022). Pariwisata halal as an Immersive Travel Experience: A Bibliometric Analysis. Academica Turistica, 15(3), 323–333. https://doi.org/10.26493/2335-4194.15.323-333

Lane, B. (2018). Will sustainable tourism research be sustainable in the future? An opinion piece. Tourism Management Perspectives, 25(December), 161–164. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.12.001

Macek, D. (2023). A Tool for Evaluating Public Procurement in the Context of Life Cycle Costs. International Journal of Economic Sciences, 12(1), 133–143. https://doi.org/10.52950/es.2023.12.1.006

Medianesia.id. (2025). Wisman ke Kepri Naik 17 Persen di Agustus 2025 - Medianesiaid

Nyanga, C., Pansiri, J., & Chatibura, D. (2020). Enhancing competitiveness in the tourism industry through the use of business intelligence: a literature review. Journal of Tourism Futures, 6(2), 139–151. https://doi.org/10.1108/JTF-11-2018-0069

https://doi.org/10.1177/0047287514546228

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. file:///D:/PENELITIAN TESIS 2024/RPJMD 2021-2026_KEPRI.pdf

Phelps, N. A., & Aritenang, A. (2023). The economic circularity of informality? Evidence from patterns of informal business innovation in Bandung. Environment and Urbanization, 35(2), 390–410. https://doi.org/10.1177/09562478231191363

Purwono, R., Esquivias, M. A., Sugiharti, L., & Rojas, O. (2024). Tourism Destination Performance and Competitiveness: The Impact on Revenues, Jobs, the Economy, and Growth. Journal of Tourism and Services, 15(28), 161–187. https://doi.org/10.29036/jots.v15i28.629

Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. In Jakarta: Sekretariat Negara (pp. 1–75).

Rosário, A. T., Lopes, P., & Rosário, F. S. (2024). Sustainability and the Circular Economy Business Development. Sustainability (Switzerland), 16(14), 1–24. https://doi.org/10.3390/su16146092

Seraphin, H., Sheeran, P., & Pilato, M. (2018). Over-tourism and the fall of Venice as a destination. Journal of Destination

© **Fitraturrahmi**
Jurnal Archipelago,
Vol 4 (2), p.131-142, Juni 2026

Marketing and Management, 9(January), 374–376. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2018.01.011

Sierra-Huelsz, J. A., & Kainer, K. A. (2018). Tourism consumption of biodiversity: A global exploration of forest product use in thatched tropical resort architecture. Geoforum, 94(May), 1–11. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.06.004

Trai, D. Van, Tien, N. H., & Quyet, N. X. (2025). The impact of digital transformation on tourism sustainable development: a case of SMEs in Vietnam. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 1(1). https://doi.org/10.1504/ijesb.2025.10062006

Tribunbatam.id (2025). Program Kerja Disnaker Kepri Berfokus pada Pelatihan dan Pemagangan Calon Pekerja - Halaman 2 - Tribunbatam.id (tribunnews.com)

Undang-undang, P. (2024). UU Nomor 59 Tahun 2024 (Vol. 20, Issue 218684).

Valls, J. F., Mota, L., Vieira, S. C. F., & Santos, R. (2019). Opportunities for pariwisata halal in Madeira. Sustainability (Switzerland), 11(17). https://doi.org/10.3390/su11174534

Wang, L. (2024). Enhancing tourism management through big data: Design and implementation of an integrated information system. Heliyon, 10(20), e38256. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e38256

Zhang, Y., & Szab, Z. (2024). Digital Transformation in the Tourism Industry: A Comparative Literature Review. Advances in Economics, Management and Political Sciences, 72(1), 166–179. https://doi.org/10.54254/2754-1169/72/20240667